



Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar

English Title: Performance of the Bali Province Education Quality Assurance Center (BPMP) in ensuring and improving the quality of public elementary school education in Denpasar City

1st Ni Putu Kamila Mustika Putri^{*a}, 2nd Putu Eka Purnamaningsih^a, 3rd Ni Wayan Supriliyani^a

^a Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana Indonesia

* Correspondence: kamilaputri0009@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the performance of the Bali Province Education Quality Assurance Center (BPMP) in ensuring and improving the Quality of Public Elementary School Education in Denpasar City. The type of research used by the author is qualitative, using research indicators put forward by Agus Dwiyanto (2006), namely Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsiveness, and Accountability. The results of this study indicate that the Productivity of BPMP Bali Province in terms of productivity has met the set targets. In terms of service quality BPMP Bali Province is still not optimal due to the lack of human resources so that the services provided are less than optimal, next is the responsiveness indicator BPMP Bali Province has carried out its obligations but the impact has not been felt significantly. The responsibility indicator has been running quite well because while running the program, BPMP Bali Province works in accordance with the applicable SOP. Then the accountability indicator is said to have gone well where this is evidenced by the accountability report made.

Keywords: Performance, BPMP, Education Quality, Denpasar City

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif, dengan menggunakan indikator penelitian yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto (2006), yakni Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Produktivitas BPMP Provinsi Bali dalam hal produktivitas telah memenuhi sasaran yang ditetapkan. Dalam hal kualitas layanan BPMP Provinsi Bali masih belum optimal karena kurangnya sumber daya manusia sehingga layanan yang diberikan kurang maksimal, selanjutnya adalah indikator responsivitas BPMP Provinsi Bali sudah menjalankan kewajiban tetapi dampaknya belum dirasakan secara signifikan. Indikator responsibilitas sudah berjalan dengan cukup baik karena selama menjalankan program, BPMP Provinsi Bali bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian Indikator akuntabilitas yang dikatakan sudah berjalan baik yang dimana hal ini dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban dibuat.

Kata Kunci: Kinerja, BPMP, Mutu Pendidikan, Kota Denpasar

Pendahuluan

Pendidikan sangat penting bagi setiap orang dalam segala aspek kehidupannya dan telah diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Adanya hal tersebut maka pendidikan dari setiap warga negara akan mempengaruhi bagaimana kehidupan bangsa tersebut akan berjalan, Pendidikan dituntut sebagai kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia, sehingga dalam melakukan pelaksanaan dan pengelolaan dari pendidikan diperlukan berbagai unsur yang memadai baik dari segi sistem, prosedur, metode, anggaran kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga kependidikan, dan lain sebagainya.

Pentingnya pendidikan mendorong pemerintah negara Indonesia untuk senantiasa mengedepankan perbaikan-perbaikan terhadap pendidikan demi terciptanya kualitas pendidikan yang terbaik bagi generasi muda bangsa, salah satunya terdapat berbagai instansi pemerintah di Indonesia yang berfokus untuk mengurus pendidikan yang menghasilkan kinerja sebagai suatu bentuk pencapaian dari program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan. Kinerja sendiri merupakan suatu hasil dalam bentuk pencapaian kerja melalui mekanisme kerja untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan baik pada individu maupun organisasi. Kinerja tidak terlepas dari sumber daya manusia atau pegawai yang melaksanakan tugas dan pembagian kerja yang sesuai pada organisasi,

guna meningkatkan produktivitas organisasi, sehingga instansi pemerintah pada bidang pendidikan dituntut pemerintah untuk memaksimalkan performanya agar menghasilkan kinerja yang baik karena secara tidak langsung akan berdampak bagi pendidikan di Indonesia.

Pendidikan yang mempunyai kualitas baik yang merupakan sampai sebatas mana pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan, sehingga pada peningkatan kualitas pendidikan diperlukan evaluasi yang berkelanjutan, pemantauan, dan perbaikan dari berbagai aspek. Evaluasi pendidikan membutuhkan ukuran atau standar yakni mutu pendidikan, yang dimana menjamin setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Adanya hal tersebut maka pentingnya mutu pendidikan bagi setiap siswa, meski demikian masih banyak terdapat kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia yang dimana hal ini merujuk pada perbedaan kualitas pendidikan baik antara berbagai kelompok maupun daerah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Indonesia bahwa angka partisipasi sekolah di Indonesia pada umur 7 sampai 12 tahun sebesar 99,10 pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan 3 kategori umur lainnya yang dilansir dari data Badan Pusat Statistik Indonesia. Seseorang pada umur 7 sampai 12 tahun menempuh pendidikan Sekolah Dasar, yang menunjukkan bahwa mayoritas anak di Indonesia telah menempuh pendidikan Sekolah Dasar. Salah satu provinsi yang memiliki angka tinggi dalam penyelesaian pendidikan Sekolah Dasar yakni provinsi Bali sebesar 97,55 pada tahun 2022 menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia. Penyelesaian pendidikan sekolah dasar di Provinsi Bali tersebut terdapat.

Kota Denpasar yang berkontribusi dengan menyumbang murid paling tinggi diantara kabupaten lainnya di Provinsi Bali yakni sebesar 81.777 murid menurut data BPS Provinsi Bali, hal ini karena Kota Denpasar sebagai ibu kota Provinsi Bali yang menjadi pusat pemerintah yang secara tidak langsung ikut menjadi pusat pendidikan.

Terdapat berbagai macam sekolah dasar di Kota Denpasar yang tersebar di berbagai kecamatan, dimana SD Negeri memiliki jumlah sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah lainnya yakni sebanyak 166 sekolah menurut data Dapo Kemdikbud dan Data Sekolah, karena SD merupakan pendidikan dasar yang perlu ditempuh oleh anak-anak. 166 SD Negeri di Kota Denpasar tersebut terdapat perbedaan akreditasi sekolah yang terdiri dari 2 kategori yakni sekolah dengan akreditasi A sebanyak 141 sekolah dan sekolah dengan Akreditasi B sebanyak 25 sekolah menurut data Kemdikbud, yang masing-masing terdapat sarana prasarana, jumlah guru baik yang berkualifikasi maupun bersertifikasi, serta jumlah siswa yang berbeda. Penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kota Denpasar lebih diperlukan pada sekolah yang memiliki status akreditasi B, karena terdapat perbedaan kualitas pendidikan atau kesenjangan mutu pendidikan. Kesenjangan mutu pendidikan dapat terjadi dikarenakan berbagai faktor seperti perbedaan dalam mengakses sumber daya pendidikan, perbedaan kualifikasi dan kualitas guru, perbedaan fasilitas sekolah serta perbedaan tingkat dukungan dan keterlibatan orang tua atau masyarakat. Kesenjangan mutu pendidikan tentunya memiliki dampak negatif yang sangat signifikan meliputi hasil belajar siswa, kesenjangan dalam kesempatan pendidikan, kesenjangan dalam peluang kerja di masa depan, hingga kesenjangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Terdapatnya kesenjangan mutu pendidikan antara satu sekolah dengan sekolah lainnya diperlukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, tugas tersebut merupakan tugas dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP).

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali masih terdapat permasalahan yang perlu dituntaskan, adanya hal tersebut maka oleh karena itu diperlukan adanya pengukuran kinerja dalam meninjau bagaimana kinerja dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Menjamin dan Meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar khususnya yang memiliki akreditasi B, di antara sekolah tersebut peneliti ingin berfokus terhadap 4 sekolah yakni SDN 4 Panjer, SDN 12 Sanur, SDN 1 Padangsambian, dan SDN 18 Padangsambian.

Terdapat kajian literatur yang membahas terkait “Analisis Kinerja BPMP Provinsi Jambi dalam Memberikan Pelayanan” oleh Bella Sabrina (2023) bahwa dalam melaksanakan tugasnya untuk melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di Provinsi khususnya Provinsi Jambi dinyatakan tingkat efisiensi dan efektivitas belum optimal, hal tersebut dapat dilihat BPMP Provinsi Jambi permasalahan pegawai dipindahkan ke Balai Guru Penggerak, serta predikat layanan BPMP Provinsi Jambi mendapat predikat yang cukup rendah dibandingkan oleh 8 dari 10 provinsi yang berada di Sumatera dimana predikat tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2021. Kemudian terkait responsibilitas dalam mengupayakan peningkatan terhadap kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan bahwa standar pelayanan telah terpajang di pintu masuk ULT BPMP Jambi, yang menunjukkan bahwa program maupun kegiatan BPMP Provinsi Jambi terselenggara, serta pegawai dari BPMP Provinsi Jambi telah melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku. Mengenai pertanggungjawaban dari hasil kinerja BPMP Provinsi Jambi melaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dimana melihat visi dan misi dari BPMP tersebut.

Adanya kajian literatur terdahulu tersebut maka terdapat kebaruan penelitian yakni membahas kinerja BPMP di Provinsi Bali yang menunjukkan perbedaan lokus penelitian sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar.

2. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka membutuhkan relevansi sebagai nilai yang ilmiah sekaligus untuk memberi batasan logis dalam sebuah penelitian, adanya hal tersebut maka penelitian-penelitian terdahulu diperlukan yang relevan dengan topik bahasan penulis untuk memperoleh nilai kebaruan baik dari segi pemikiran, pandangan, maupun gagasan. Penelitian mengenai “Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam Menjamin Mutu Pendidikan Sekolah di Kota Denpasar” belum pernah dikaji sebelumnya, meskipun demikian terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai kinerja organisasi dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang sumbernya berasal dari hasil-hasil skripsi maupun jurnal-jurnal yang relevan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan terkait permasalahan yang diteliti.

Kajian pustaka yang pertama yakni ditulis oleh Bella Sabrina (2023) terkait “Analisis Kinerja BPMP Provinsi Jambi dalam Memberikan Pelayanan”. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan di Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan. Peneliti juga menggunakan rancangan penelitian berupa data kualitatif, dengan hasil penelitian yakni menunjukkan bahwa Kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi dalam memberikan pelayanan secara umum dapat dikatakan masih belum maksimal.

Kajian pustaka yang kedua yaitu penelitian dengan judul “Peran Strategi Kepemimpinan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai pada Instansi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara” yang ditulis oleh dua penulis yakni Siti Jubaidah dan Ahmadi Bi Rahmani (2023). Penelitian ini memanfaatkan metode kualitatif dalam memahami fenomena yang terjadi dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan sebagai hal penting dalam menyelesaikan permasalahan dan dapat memberikan dukungan kerja bagi pegawai yang dimana pada Instansi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara masih belum memenuhi tata kelola yang tepat

sehingga permasalahan tersebut perlu segera diatasi agar hasil kinerja dapat meningkat dan maksimal sesuai harapan yang telah ditetapkan.

Kajian pustaka yang ketiga yakni berjudul “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar” ditulis oleh Dedeh Rahwati (2019). Penelitian ini bertujuan memberikan informasi terkait implementasi dari penjaminan untuk meningkatkan mutu sekolah, dengan menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Hasilnya menyampaikan (1) implementasi belum dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan mutu sekolah karena terdapat kurangnya keterlibatan dari seluruh stakeholder pendidikan dan anggaran yang memadai. (2) terdapat hambatan implementasi yakni kegiatan evaluasi sekolah yang masih belum optimal untuk mengevaluasi kinerja sekolah. (3) upaya dalam mengatasi kendala yang dihadapi dengan memperbaiki hasil dari pemenuhan mutu, peningkatan target, kemudian perbaikan, serta penetapan untuk peningkatan sasaran mutu.

Kajian pustaka yang keempat yakni mengenai “*The Effect of Benefits and Work Discipline on Employee Productivity at The Geological Survey Center Bandung*” ditulis oleh dua penulis yakni Dara Umulkulsum dan R. Achmad Drajat Aji Suaji (2020), dalam bahasa Indonesia berarti “Pengaruh Tunjangan dan Disiplin Kerja terhadap Produktivitas Pegawai pada Pusat Survei Geologi Bandung”. Penelitian dengan kuantitatif untuk menjelaskan hubungan yang dipengaruhi oleh variabel-variabel yang diteliti yaitu variabel pengaruh tunjangan dan disiplin kerja terhadap variabel produktivitas Balai Survei Geologi Bandung. Hasil penelitian melalui pengujian hipotesis diperoleh bahwa produktivitas pegawai di Balai Survei Geologi Bandung dipengaruhi oleh pengaruh disiplin kerja (27,34%) dan pemberian tunjangan (9,07%). Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa harapan produktivitas dari kinerja yang dipengaruhi oleh kedisiplinan dan pemberian tunjangan sudah sesuai dengan penerapan tata kelola yang baik sebagai bentuk reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja Balai Survei Geologi Bandung.

Kajian pustaka yang kelima dengan judul “*Analysis of Educational Quality, a Goal of Education for All Policy*” yang ditulis oleh Rehaf A. Madani (2019), dalam bahasa Indonesia yakni “Analisis Mutu Pendidikan, Tujuan Pendidikan untuk Semua Kebijakan”. Tujuan yang diutamakan oleh mayoritas negara yakni mengoptimalkan tingkat akses pendidikan tetap terjamin untuk meningkatkan kualitas. Kualitas tercermin pada pengeluaran pemerintah dalam pendidikan, rasio dari para siswa dan guru, kualifikasi guru yang mengajar, nilai ujian, serta waktu yang dihabiskan siswa di sekolah. Setiap investasi harus diukur berdasarkan bagaimana investasi tersebut dapat melayani aspek-aspek tersebut untuk memastikan kualitas terbaik dari program Pendidikan untuk Semua. Berinvestasi dalam pendidikan memperkuat kekayaan dan pertumbuhan masyarakat, sehingga setiap individu dapat dengan mudah meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan pendapatan pribadinya. Tantangan terbesarnya terletak pada penentuan indikator dan keadaan pendidikan ideal pada beragam negara yang ada, khususnya negara yang perkembangannya kurang yang berusaha untuk menetapkan tema evaluasi berkualitas. Oleh karena itu, diperlukan sudut pandang dan kerangka pemikiran yang beragam untuk mewujudkan evaluasi kebijakan pendidikan yang benar-benar dapat berkontribusi pada perbaikan situasi pendidikan di negara-negara berkembang dan seluruh dunia.

Dari lima paparan penelitian sebelumnya, dapat dilihat terdapat persamaan dan perbedaan dengan riset yang dilaksanakan penulis. Penelitian pertama yang ditulis oleh Bella Sabrina tahun 2023 dengan judul “Analisis Kinerja BPMP Provinsi Jambi dalam Memberikan Pelayanan” yang Pada penelitian tersebut juga melakukan penelitian terkait kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dalam memberikan pelayanan yakni menjamin mutu pendidikan, perbedaan dengan penelitian penulis sekarang yakni lokasi penelitian yang dimana penelitian sebelumnya pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi sedangkan sekarang penulis meneliti pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali. Penelitian kedua yang ditulis oleh Siti Jubaidah dan Ahmadi Bi Rahman tahun 2023 dengan judul “Peran Strategi Kepemimpinan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai pada Instansi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara” dimana terdapat persamaan yakni sama-sama meneliti kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) sedangkan perbedaannya yakni pada penelitian sebelumnya

meneliti peran strategi kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas kinerja serta tempat penelitian yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang berbeda provinsi.

Penelitian yang ketiga dengan judul “Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar” yang ditulis oleh Dedeh Rahwati pada tahun 2019 terdapat kesamaan yakni meneliti penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan pada Sekolah Dasar. Adapun perbedaan penelitian sebelumnya yakni membahas terkait implementasi dari sistem penjaminan mutu pendidikan guna meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Dasar, sedangkan sekarang penulis terfokus pada kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian yang keempat yang ditulis Dara Umulkulsum dan R. Achmad Drajat Aji Suaji tahun 2020 dengan judul “*The Effect of Benefits and Work Discipline on Employee Productivity at The Geological Survey Center Bandung*” terdapat kesamaan yakni membahas kinerja organisasi. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sedangkan sekarang penulis menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan terkait kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dengan menggunakan indikator pengukuran kinerja. Penelitian terakhir yang ditulis oleh Rehaf A. Madani pada tahun 2019 dengan judul “*Analysis of Educational Quality, a Goal of Education for All Policy*”, terdapat kesamaan yakni membahas menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan. Adapun perbedaannya yakni pada penelitian sebelumnya membahas pentingnya penjamin dan peningkatan mutu pendidikan bagi seluruh negara, sedangkan sekarang penulis terfokus pada kinerja organisasi publik dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar.

Teori Kinerja

Kinerja berasal dari kata *job performance* yang dapat diartikan sebagai pencapaian seseorang dalam bentuk prestasi kerja selama periode yang telah ditentukan maupun disepakati sebelumnya. Kinerja atau *performance* merupakan suatu gambaran terkait tingkat pencapaian dari suatu pelaksanaan kegiatan dapat berupa program-program maupun kebijakan yang telah diputuskan dalam mewujudkan visi misi, tujuan, dan sasaran dari organisasi. Menurut Agus Dwiyanto (1995) Kinerja merupakan suatu tingkat pencapaian hasil dan tujuan organisasi yang dimana terdapat indikator kinerja yakni besaran yang mampu digunakan guna menentukan tingkat dari suatu pencapaian terhadap tujuan yang meliputi output, efisiensi dan efektivitas. Pasolong (2014) menjelaskan bahwa kinerja dapat dilihat dari dua sudut pandang yakni kinerja pada pegawai yang berarti per-individu serta kinerja pada organisasi yang berarti pada lembaga. Kinerja pada pegawai merupakan hasil kerja dari perseorangan dalam suatu organisasi, sedangkan kinerja pada organisasi merupakan seluruh hasil kerja yang telah dicapai oleh suatu organisasi. Menurut Mahsun (2006) kinerja merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang pada perencanaan strategis suatu organisasi. Berbagai penjelasan kinerja dari berbagai ahli maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu hasil dalam bentuk pencapaian kerja melalui mekanisme kerja untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan agar dapat mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan baik pada individu maupun organisasi. Kinerja dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat tingkat pencapaian atau hasil kerja dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam melaksanakan tugasnya yakni menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan.

Indikator Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja menurut Robertson dalam Mahmudi (2010) mempunyai definisi sebagai suatu penilaian dalam kemujah terhadap tujuan maupun sasaran dari suatu proses pekerjaan yang meliputi informasi-informasi terkait efisiensi dan aktivitas dalam mencapai tujuan, membandingkan hasil dari pelaksanaan kegiatan dengan target yang ditetapkan, penggunaan dari sumber daya untuk menghasilkan suatu barang atau jasa, serta kualitas dari barang atau jasa tersebut. Pengukuran dari kinerja merupakan suatu proses untuk mencatat dan mengukur terhadap pencapaian dari kegiatan yang terlaksana dalam arah pencapaian menurut Larry D. Stout dalam Yuwono (2002). Menurut Dwiyanto dalam Pasolong (2014) pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting sebagai tolak ukur keberhasilan

suatu organisasi dalam mencapai misinya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja merupakan proses pencatatan, pengukuran, dan penilaian dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan maupun tujuan yang telah ditetapkan melalui hasil-hasil yang diberikan dapat berupa produk, jasa, atau pelayanan publik

Pengukuran kinerja yang dilakukan untuk menilai kinerja dari suatu organisasi maupun individu memiliki klafikasi dan indikator sebagai penentu dan acuan yang digunakan sebagai indikasi yang mewakili pada pelaksanaan kinerja. Adapun indikator kinerja yang dikemukakan oleh beberapa ahli yakni terdapat beberapa klasifikasi pengukuran kinerja, diantaranya menurut Agus Dwiyanto (2006):

1. Produktivitas
Konsep produktivitas untuk mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas pada pelayanan, sehingga dapat memberikan gambaran terkait produktivitas yang berjalan sesuai dengan tujuannya.
2. Kualitas Layanan
Kualitas layanan dapat dirasakan oleh publik atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan dapat dilihat bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja melalui kualitas pegawai dan ketersediaan sarana prasarana
3. Responsivitas
Responsivitas merupakan kesanggupan suatu organisasi dalam mengenali keperluan publiknya, yang dimana menunjukkan pada keselarasan antara program maupun kegiatan dari pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Responsibilitas
Responsibilitas menggambarkan apakah penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan dalam organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar maupun selaras dengan kebijakan pada organisasi.
5. Akuntabilitas
Akuntabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar konsisten kebijakan dan kegiatan organisasi publik terhadap publiknya dalam bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah dilaksanakan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan jenis penelitian kualitatif, menurut Moleong, (2007) bahwa penelitian bertujuan dalam memahami fenomena dari subyek penelitian secara menyeluruh dengan menggunakan berbagai metode yang ilmiah untuk mendeskripsikan secara kata-kata dan bahasa. Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian ini akan memanfaatkan penelitian deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan terkait kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kota Denpasar. Metode penelitian deskriptif kualitatif dapat menjadi pemaparan yang lebih rinci dengan menghasilkan data berupa tulisan yang spesifik dan sistematis terkait hasil kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali.

Penelitian terkait kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kota Denpasar, yakni sebagai berikut:

Data primer merupakan pemberian data secara langsung yang diperoleh sendiri oleh peneliti dari sumber awal atau objek penelitiannya (Sugiyono, 2016). Perolehan pada sumber data primer dari hasil wawancara kepada informan terkait kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dalam menjamin mutu pendidikan sekolah dasar negeri di Kota Denpasar.

Data Sekunder merupakan sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada pengumpul data, seperti perolehan dari orang lain atau melalui dokumen, penggunaan data sekunder berfungsi

sebagai sumber data untuk melengkapi data primer yang diperlukan (Sugiyono, 2016:225). Sumber data sekunder dalam penelitian diperoleh melalui berbagai arsip, jurnal, buku, dokumen pribadi dan dokumen resmi dalam menunjang dari sumber data primer serta mencari penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian melalui pencarian pada *platform digital* yakni Google Cendekia dengan menggunakan kata kunci: kinerja, pendidikan, sekolah.

Unit analisis sebagai satuan yang diteliti dalam penelitian, yang dapat berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial sebagai subjek penelitian (Sugiyono, 2016:298). Penelitian ini menggunakan unit analisis yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali sebagai instansi yang menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar negeri khususnya di Kota Denpasar.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Temuan

Pengukuran kinerja merupakan proses pencatatan, pengukuran, dan penilaian dalam pencapaian pelaksanaan kegiatan maupun tujuan yang telah ditetapkan melalui hasil-hasil yang diberikan dapat berupa produk, jasa, atau pelayanan publik, sehingga pengukuran kinerja tersebut sangat penting dalam mengukur keberhasilan dari suatu organisasi. Pengukuran kinerja tersebut tentunya membutuhkan indikator dalam menilai tingkat pencapaian dari kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali.

Adapun hasil temuan dari penelitian mengenai kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar yang mengacu pada indikator kinerja oleh Agus Dwiyanto (2006) adalah sebagai berikut:

Produktivitas

Indikator produktivitas merupakan indikator yang memberikan gambaran secara umum terkait kinerja pada suatu organisasi apakah proses atau kegiatan yang telah dilakukan sejalan dengan harapan atau tujuan yang diinginkan. Adanya produktivitas tersebut akan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari organisasi yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali, yang dimana efisiensi sebagai tingkat keberhasilan dan efektivitas sebagai tujuan atau target yang telah ditentukan oleh BPMP Provinsi Bali, sehingga input dan output yang dihasilkan akan terlihat hasil kinerja terkait produktivitas telah mencapai produktivitas yang maksimal dan tentu saja sejalan dengan tujuannya.

Dalam hal ini produktivitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar dapat diketahui dari kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Produktivitas yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Bali dapat dilihat bagaimana proses pelaksanaan pada program kerja yang telah ditetapkan.

Dari kutipan wawancara dapat disimpulkan bahwa produktivitas telah dilaksanakan dengan baik oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar, karena proses pelaksanaan program maupun kegiatan telah dilakukan sesuai dengan harapan yang dimulai dari pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam peningkatan mutu. Selain itu terpenuhinya sasaran pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yakni peningkatan rapor pendidikan yang menunjukkan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, yang dimana berjalannya program atau kegiatan didukung dengan rapat koordinasi baik secara internal BPMP Provinsi Bali maupun secara eksternal dengan berbagai pemangku kepentingan yang bersangkutan.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan hal dirasakan oleh publik atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga kualitas layanan dapat dikatakan baik dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat tersebut. Adanya hal tersebut maka indikator kualitas layanan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi agar melihat bagaimana pelayanan yang diberikan dapat memuaskan publik atau masyarakatnya.

Kualitas layanan ini dilihat melalui bagaimana kemampuan organisasi publik untuk memanfaatkan energi organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan. Pelayanan yang baik ditentukan oleh individu atau sumber daya manusia dalam organisasi bekerja secara efektif, karena sumber daya manusia dapat melakukan dan menyelesaikan pelayanan untuk kebutuhan dari publiknya. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali sendiri sampai saat ini masih belum memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan berbagai program kerja yang kompleks.

Adapun daftar jumlah sumber daya manusia di BPMP Provinsi Bali yang didasarkan pada kualifikasi pendidikan yang dimiliki, dimana terdapat 61 orang yang menjadi pegawai BPMP Provinsi Bali.

Tabel 1. Daftar SDM BPMP Provinsi Bali

Daftar SDM BPMP Provinsi Bali		
No	Kualifikasi Pendidikan	
1	S-3	2
2	S-2	16
3	S-1	25
4	D-3	3
5	SMA	14
6	SMP	1
Total		61

Sumber: BPMP Provinsi Bali (diolah oleh penulis)

Dalam mengatasi permasalahan sumber daya manusia, BPMP Provinsi Bali memberikan beberapa pelatihan-pelatihan khusus untuk pegawainya untuk menunjang pelayanan yang maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan menyatakan bahwa kualitas layanan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dapat dikatakan belum optimal karena kurangnya jumlah pegawai BPMP Provinsi Bali dalam menjalankan program maupun kegiatan yang kompleks serta sasaran yang begitu luas, walaupun ketersediaan sarana prasarana telah memadai tetapi sistem informasi yang masih belum terkelola dengan baik. Selain itu terdapat upaya yang dilakukan BPMP Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan kinerja, tetapi pihak sekolah belum merasakan dampak yang signifikan terkait kualitas layanan yang diberikan.

Responsivitas

Indikator responsivitas merupakan kesanggupan suatu organisasi dalam mengenali keperluan publiknya, yang dimana menunjukkan pada keselarasan antara program maupun kegiatan dari pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Indikator ini sebagai salah satu mengukur kinerja karena dapat melihat bagaimana kepekaan organisasi melalui selaras atau tidaknya suatu pelayanan dari program atau kegiatan yang ditentukan terhadap kebutuhan publik maupun masyarakat, sehingga responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tujuannya.

Berdasarkan hasil wawancara, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali saat menanggapi keluhan dari sekolah mereka akan berupaya untuk mengatasi permasalahan sekolah walaupun pihak sekolah jarang melaporkan keluhannya. Terkait pelaksanaan program BPMP Provinsi Bali dilakukan telah sesuai dengan permasalahan yang ada karena sudah dikordinasikan dengan pihak terkait untuk penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan, tetapi pihak sekolah masih kurang yakin dan jarang berinteraksi secara langsung ke BPMP Provinsi Bali sehingga kegiatan maupun program yang dilakukan masih kurang terasa

pengaruhnya. Adanya hal tersebut BPMP Provinsi Bali melakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja mereka lebih baik lagi, sehingga responsivitas dari BPMP Provinsi Bali masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya.

Responsibilitas

Responsibilitas menggambarkan apakah penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan dalam organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar maupun selaras dengan kebijakan pada organisasi. Responsibilitas penting sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja karena dapat mengukur pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip administrasi maupun kebijakan organisasi.

Berdasarkan wawancara dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dari BPMP Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar sudah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku, selain itu BPMP Provinsi Bali juga mengeluarkan surat keputusan terkait penetapan standar pelayanan sehingga dapat disimpulkan bahwa responsibilitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dapat dikatakan baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar konsisten kebijakan dan kegiatan organisasi publik terhadap publiknya dalam bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah dilaksanakan. Kinerja tidak hanya diukur pada internal organisasi tetapi secara eksternal sehingga dengan akuntabilitas yang tinggi maka organisasi publik dianggap benar sesuai dengan norma dalam masyarakat.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan berbagai pihak dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali sudah cukup baik, hal ini dikarenakan telah terdapat laporan pertanggungjawaban dari BPMP Provinsi Bali kepada Direktorat Kemendikbudristek RI sesuai dengan mekanisme yang berlaku maupun terdapat LAKIN atau Laporan Kinerja, selain itu adanya pelaporan pertanggungjawaban secara terbuka kepada publik atau masyarakat yang dibagikan pada kanal-kanal yang dimiliki oleh BPMP Provinsi Bali sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi publik.

Pembahasan

Produktivitas

Indikator produktivitas merupakan indikator yang memberikan gambaran secara umum terkait kinerja pada suatu organisasi apakah proses atau kegiatan yang telah dilakukan sejalan dengan harapan atau tujuan yang diinginkan. Adanya produktivitas tersebut akan mengukur tingkat efisiensi dan efektivitas dari organisasi, yang dimana efisiensi sebagai tingkat keberhasilan dan efektivitas sebagai tujuan atau target yang telah ditentukan. Menurut Dwiyanto (2006), konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas pelayanan. Adanya hal tersebut maka input dan output yang dihasilkan akan terlihat hasil kinerja terkait produktivitas telah mencapai produktivitas yang maksimal dan tentu saja sejalan dengan tujuannya. Dalam hal ini produktivitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dapat diketahui dari keberhasilan dalam merealisasikan program dan kegiatan dengan melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Hal ini didukung bahwa kinerja BPMP Provinsi Bali berhasil merealisasikan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis BPMP Provinsi Bali dalam hal menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar dibuktikan dengan peningkatan rapor pendidikan pada sekolah dasar, adanya hal ini juga didukung oleh rapat koordinasi yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Bali baik secara internal maupun secara eksternal dengan berbagai pemangku kepentingan yang bersangkutan. Hal tersebut membuktikan bahwa produktivitas kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar dapat dikatakan baik.

Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan hal dirasakan oleh publik atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan, sehingga kualitas layanan dapat dikatakan baik dengan melihat tingkat kepuasan masyarakat tersebut. Adanya hal tersebut maka indikator kualitas layanan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi agar melihat bagaimana pelayanan yang diberikan dapat memuaskan publik atau masyarakatnya. Adanya hal tersebut maka kualitas layanan ini dilihat melalui bagaimana kemampuan organisasi publik untuk memanfaatkan energi organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal, tentu saja perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Jumlah sumber daya manusia yang ada di BPMP terkait masih kurang dalam menangani banyaknya program yang kompleks serta keberagaman kondisi dan karakter dari para stakeholder. Kurangnya sumber daya manusia tersebut tentunya menjadi hambatan dalam pelaksanaan program kerja sehingga mengakibatkan kurangnya kualitas layanan yang akan diberikan, meskipun sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang program-program BPMP Provinsi Bali sudah lengkap. Selain itu satuan pendidikan atau pihak Sekolah Dasar merasakan kualitas layanan yang berikan masih kurang berpengaruh, meskipun pihak BPMP Provinsi Bali telah melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja melalui inovasi-inovasi seperti SIPPeDE, SIPutdariBali, dan Layanan ULT. Adanya hal tersebut membuktikan bahwa kualitas layanan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali masih kurang optimal.

Responsivitas

Indikator responsivitas merupakan kesanggupan suatu organisasi dalam mengenali keperluan publiknya, yang dimana menunjukkan pada keselarasan antara program maupun kegiatan dari pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Indikator ini sebagai salah satu mengukur kinerja karena dapat melihat bagaimana kepekaan organisasi melalui selaras atau tidaknya suatu pelayanan bentuk program atau kegiatan yang ditentukan terhadap kebutuhan publik maupun masyarakat, sehingga responsivitas menggambarkan kemampuan organisasi dalam menjalankan tujuannya. Responsivitas juga secara langsung menggambarkan bagaimana kemampuan dari organisasi dalam menjalankan program maupun kegiatan melalui misi dan udalam menjalankan misi untuk mencapai tujuannya, yang dimana mementingkan terpenuhinya kebutuhan dari masyarakat atau publiknya (Dwiyanto 2006: 51). Organisasi yang memiliki tingkat kepekaan yang tinggi ditunjukkan dengan kesesuaian pelayanan yang diberikan dengan kebutuhan masyarakat.

Tanggapan pihak Kepala Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar terkait penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di sekolah mereka mengatakan masih belum merasakan perubahan yang signifikan baik secara bentuk peningkatan maupun penurunan, karena hal tersebut lebih banyak dilakukan sendiri oleh sekolah. Program yang dilakukan oleh BPMP telah sesuai dengan permasalahan yang ada dan penanganan keluhan dilakukan cukup baik, walaupun dampak yang dirasakan pihak sekolah masih kurang. Adanya hal tersebut maka BPMP Provinsi Bali melaksanakan rapat evaluasi untuk mendiskusikan hasil kegiatan mereka dengan kelompok kerja masing-masing dan akan melakukan rapat triwulan secara menyeluruh untuk melakukan evaluasi dan refleksi terkait kegiatan maupun program yang telah dilakukan. Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa responsivitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dapat dikatakan belum cukup baik

Responsibilitas

Responsibilitas menggambarkan apakah penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan dalam organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar maupun selaras dengan kebijakan pada organisasi. Responsibilitas penting sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja karena dapat mengukur pelaksanaan kegiatan organisasi sesuai dengan prinsip administrasi maupun kebijakan organisasi. Dalam hal ini Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali melaksanakan kegiatan memiliki peraturan atau prosedur dalam bekerja, para pegawai telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku agar pelayanan yang diberikan akan berdampak baik kepada publik atau

masyarakat. SOP dalam bekerja BPMP Provinsi Bali mengeluarkan SK sebagai prosedur yang mengarahkan para pegawai yakni SK Kepala BPMP Provinsi Nomor: 0505/C7.18/OT.02.02/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di BPMP Provinsi Bali sebagai standar dalam memberikan pelayanan yang mencantumkan prinsip-prinsip administrasi maupun kebijakan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuan dari kebutuhan yang diperlukan. Adanya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa responsibilitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar dapat dikatakan cukup baik.

Akuntabilitas

Akuntabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar konsisten kebijakan dan kegiatan organisasi publik terhadap publiknya dalam bentuk pertanggungjawaban dari apa yang telah dilaksanakan. Kinerja tidak hanya diukur pada internal organisasi tetapi secara eksternal, yang dimana melalui akuntabilitas dalam bentuk pertanggungjawaban terhadap kebijakan maupun kegiatan yang telah dilaksanakan konsisten sesuai keinginan masyarakat atau publiknya. sehingga dengan akuntabilitas yang tinggi maka organisasi publik dianggap benar sesuai dengan norma dalam masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya akuntabilitas maka organisasi sebagai pihak yang memberikan pelayanan memiliki tanggung jawab yang cukup baik. Laporan pertanggungjawaban dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali telah dilakukan dengan baik, yang dimana pertanggungjawaban secara privat kepada Kemendikbudristek sesuai dengan mekanisme yang berlaku serta pertanggungjawaban secara terbuka kepada publik atau masyarakat melalui kanal-kanal yang dimiliki oleh BPMP Provinsi Bali. Pelaporan terkait kinerja, realisasi anggaran maupun inovasi yang diberikan telah tercantum pada LAKIN (Laporan Kinerja) yang telah dibuat oleh BPMP Provinsi Bali. Pelaporan terbuka yang dilakukan oleh BPMP Provinsi Bali dengan membagikan hasil kegiatan berupa dokumentasi melalui *website*, media sosial maupun media cetak, sehingga pertanggungjawaban dari BPMP Provinsi Bali dapat diakses untuk menciptakan akuntabilitas. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada BPMP Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar di Kota Denpasar, adanya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali telah berjalan dengan baik.

Faktor Pendukung Kinerja BPMP Provinsi Bali

Pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali akan berjalan dengan baik jika ditunjang oleh faktor-faktor yang mendorong terjadinya efektivitas dan efisiensi kinerja suatu organisasi. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai faktor pendorong atau faktor pendukung dari kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar, yaitu:

1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pelaksanaan kegiatan maupun program telah dimanfaatkan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam memperkuat pelayanan yang prima bagi publik dan masyarakat, sehingga sarana dan prasarana tersebut menjadi faktor pendukung bagi keberhasilan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sekaligus memudahkan pegawai pada saat bekerja.
2. Evaluasi yang diberikan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali terhadap program-program yang digunakan untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar.
3. Anggaran atau dana yang diperuntukan dalam melaksanakan kegiatan maupun program untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri telah mencukupi, anggaran tersebut pula dipertanggungjawabkan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam bentuk pelaporan di setiap tahunnya secara terbuka kepada publik atau masyarakat.

Beberapa penjelasan tersebut merupakan faktor pendukung yang bertujuan untuk mempermudah kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali, hal ini pelaksanaan kegiatan dan program yang berjalan dapat melaksanakan kinerjanya dengan lebih efektif dan efisien.

Faktor Penghambat Kinerja BPMP Provinsi Bali

Pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan akan kurang optimal jika terdapat faktor-faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program. Berikut penjelasan mengenai faktor penghambat kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar, yaitu:

1. Kurangnya sumber daya manusia yang ada pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan dan masih terdapat pegawai yang mengambil pekerjaan lebih dari satu pekerjaan yang mengakibatkan kinerja yang diciptakan masih kurang maksimal.
2. Terdapat beberapa satuan pendidikan yang belum melaksanakan validasi data untuk kebutuhan administrasi, sehingga menghambat BPMP Provinsi Bali dalam melakukan pengecekan data untuk menganalisis sekolah pada saat pemetaan mutu.
3. Rapor pendidikan yang masih secara maksimal digunakan untuk melakukan perencanaan mutu, pelaksanaan mutu, pemenuhan mutu, serta evaluasi dari peningkatan mutu yang dapat diakses oleh satuan pendidikan maupun pemerintah daerah.
4. Sistem informasi yang mendukung pelaksanaan dari program kerja yang masih belum terkelola dengan baik sehingga informasi yang tersedia masih kurang dinamis dan berkelanjutan

Beberapa penjelasan tersebut merupakan faktor penghambat kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar.

5. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terkait kinerja Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar berjalan cukup baik, namun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat melalui analisa dari indikator kinerja, yang dapat disimpulkan, antara lain:

1. Indikator produktivitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan program sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Indikator kualitas layanan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar dapat dikatakan belum baik karena jumlah pegawai yang masih kurang sehingga layanan yang diberikan kurang maksimal.
3. Indikator responsivitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar cukup baik, tetapi dampak yang dirasakan oleh satuan pendidikan atau sekolah masih belum terasa signifikan sehingga responsivitas BPMP Provinsi Bali masih kurang dalam pelaksanaannya.

4. Indikator responsibilitas Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kota Denpasar pelaksanaannya sudah baik karena telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku, selain itu BPMP Provinsi Bali juga mengeluarkan surat keputusan terkait penetapan standar pelayanan.
5. Indikator akuntabilitas dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bali sudah baik, hal ini dikarenakan telah terdapat laporan pertanggungjawaban dari BPMP Provinsi Bali kepada pemerintah dan juga kepada publik atau masyarakat yang bersifat terbuka sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas organisasi publik

Daftar Pustaka

- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.
- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM Yogyakarta
- <https://bali.bps.go.id/> diakses pada tanggal 5 September 2023
- <https://data.sekolah-kita.net/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023
- <https://sekolah.data.kemdikbud.go.id/> diakses pada tanggal 18 Oktober 2023
- <https://www.bps.go.id/> diakses pada tanggal 5 September 2023
- Jubaidah, Siti & Rahmani Ahmadi Bi. 2023. "Peran Strategi Kepemimpinan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kinerja Pegawai pada Instansi Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumatera Utara", No. 3, Vol. 11.
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Madani, Rehaf. 2019. " *Analysis of Educational Quality, a Goal of Education for All Policy*". *Higher Education Studies*, No. 1, Vol. 9.
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Cetakan ke-1*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Pasolong, H. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta. Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-7. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Rahwati, Dedeh. 2019. "Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar". *Indonesian Journal of Education Management and Administration Review*, No. 1, Vol. 3.
- Umulkulsum, D., & R. Achmad Drajat Aji Suaji. 2020). *The Effect of Benefits and Work Discipline on Employee Productivity at The Geological Survey Center Bandung*. *Technium Social Sciences Journal*, No. 1, Vol. 14.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.